

PERSPEKTIF SOSIOLOGIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN MENDUKUNG PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI LAHAN MARJINAL

R O O S G A N D A E L I Z A B E T H

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

ABSTRAK

Dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda berkepanjangan, angka penduduk miskin kembali mengalami peningkatan, namun setelah tahun 2000, diprediksi jumlah penduduk miskin tersebut telah kembali menurun meski secara perlahan. Tulisan ini bertujuan mengemukakan secara komprehensif karakteristik faktor-faktor penyebab kemiskinan di NTT. Kegiatan usahatani merupakan mata pencaharian utama sebagian besar rumah tangga responden dan kontribusi usahatani padi masih mendominasi pendapatan keluarga. Usaha ternak dan non farm (dagang, industri rumah tangga, dan pertukangan) potensial untuk ditingkatkan. Perbaikan dan pengembangan teknologi indigenous petani perlu dipertimbangkan sebelum introduksi teknologi baru disosialisasikan. Meningkatnya aksesibilitas petani miskin terhadap pelaksanaan program pembangunan penanggulangan kemiskinan melalui penerimaan berbagai program bantuan. Untuk mengembangkan pembangunan di NTT, keberpihakan terhadap lembaga kekerabatan sangat diperlukan, bukan lembaga bersifat materi, karena mempengaruhi semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, dan aktivitas pembangunan pengembangan wilayah. Model dan bentuk bantuan seharusnya spesifik lokasi dan kemampuan (SDM) petani yang menjadi target. Diperlukan strategi pemberdayaan dan partisipatif petani miskin, sebagai keberpihakan terhadap petani miskin, serta tindakan perlindungan sehingga pemberdayaan juga dapat berfungsi sebagai upaya memamdirikan petani miskin dan mencegah ketergantungan pada program bantuan.

Kata Kunci : *Kemiskinan, Lahan Marjinal, Perspektif sosiologi.*

PENDAHULUAN

Sekitar dekade 1990-an, Indonesia sebenarnya berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat, termasuk masyarakat pertanian dan perdesaan (BPS, 1995, 2003). Peningkatan taraf hidup tersebut terkait dengan peningkatan pendapatan serta berkurangnya jumlah penduduk miskin (Pakpahan, *et al*, 1995). Dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda berkepanjangan, angka penduduk miskin kembali mengalami peningkatan, mencapai sekitar 49,5 juta jiwa, dimana teridentifikasi sekitar 17,6 juta jiwa terdapat di perkotaan dan 31,9 juta jiwa berada di perdesaan. Namun, setelah tahun 2000, diprediksi jumlah penduduk miskin tersebut telah kembali menurun meski secara perlahan.

Berbagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, terutama disebabkan kurang efektifnya sosialisasi program baik terhadap masyarakat (target) maupun pada pelaksanaannya, karena tidak mengikut sertakan secara aktif masyarakat (Nurmanaf, *et al*, 2002). Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan keberlanjutan kinerja program, merupakan tindakan pemberdayaan masyarakat yang berpihak. Partisipasi masyarakat tersebut merupakan *basic need* (Sumardi dan Evers, 1982), dan *basic human right* (FAO, 1990), di samping kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai fasilitas publik lainnya; serta peran kelembagaan lokal terkait dengan *indigenous knowledge*.

Tulisan ini bertujuan mengemukakan secara komprehensif karakteristik faktor-faktor penyebab kemiskinan dengan menyajikan kasus di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dari tulisan ini diharapkan keluaran berupa informasi berbagai faktor penyebab rumah tangga menjadi miskin, spesifikasi di lahan marjinal, yang dapat menjadi saran rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan masyarakat pertanian dan perdesaan di lahan marjinal.

PERSPEKTIF SOSIOLOGIS KEMISKINAN PETANI DI LAHAN MARJINAL

Beberapa pola kemiskinan yang perlu diketahui, yaitu: 1) *persistent poverty*, kemiskinan yang kronis dan turun temurun. Umumnya terindikasi didaerah terisolasi atau yang sumberdaya alamnya kritis; 2) *cyclical poverty*, kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; 3) *seasonal poverty*, kemiskinan yang bersifat musiman; umum terjadi pada rumahtangga nelayan dan petani tanaman pangan; 4) *accidental poverty*, kemiskinan akibat terjadinya sesuatu hal (bencana alam, misalnya) (Kartasmita, 1996).

Kemiskinan merupakan resultan dari berbagai faktor, seperti: ketimpangan struktur sosial, sulit dikembangkan sistem usaha pertanian dan teknologi; tidak terdesentralisasinya penyelenggaraan sistem pemerintahan; atau kurang berpihaknya kebijakan pemerintah mengentaskan masyarakat miskin (Baigorri, 1999; dalam: Elizabeth, 2007a). Kemiskinan dapat terjadi dimana saja, tetapi tidak ada analisis eksplisit dan terperinci tentang kemiskinan absolut dan apa penyebab ekonominya sehingga orang menjadi miskin. Berbagai penelitian hanya melihat dari transisi usahatani subsisten ke komersil sebagai kuncinya, atau lebih banyak mengatakan tentang pengaruh sosial dan politik dari dualisme ekonomi, serta semangat pengaruh pemusatan kekuatan ekonomi terhadap yang miskin.

Kelalaian tersebut terjadi karena tidak disadari adanya kemiskinan absolut, dan adanya proses pemelaratan. Penyebab utamanya adalah “kegagalan pemberian hak” (*entitlements*), yaitu *orang yang tidak memperoleh kesempatan yang cukup* untuk memperoleh pekerjaan/usaha sebagai sumber pendapatan, yang disebabkan cara kerja pasar dan lembaga terkait lainnya. Peran sentral ekonomi dan kekuatan sosial lain sebagai faktor penentu terjadinya kemiskinan di suatu daerah, dimana mekanisme harga memainkan peran dominan dalam alokasi sumberdaya (Elizabeth, 2007b). Masalah kemiskinan sebagai salah satu bentuk ketidakberdayaan masyarakat, dimana beberapa hal mungkin terabaikan dalam pengkajian kemiskinan tersebut.

Kemiskinan dapat disebabkan faktor eksternal (struktural/pengaruh luar) dan internal, dimana faktor eksternal adalah: aspek sosial budaya dan kelembagaan; dampak dari awal, sirkulasi dan kumulatif dampak dari proses pembangunan; pengaruh struktur pasar atau monopolistik atau oligopsonik produsen dan pedagang; serta infrastruktur dan sarana prasarana yang kurang memadai. Faktor internal adalah yang berasal dari diri sendiri yang meliputi: keterbatasan kualitas SDM dan pemilikan sumberdaya (faktor produksi; rendahnya tingkat pendapatan; lemahnya potensi *enterprenurship*).

Kemiskinan juga terjadi karena golongan termiskin terpenjara sistem struktur sosial eksploitatif yang melanggengkan ketergantungannya dan kelumpuhannya, yang digambarkan Geertz sebagai “*agricultural involution*”. Konteks ini kiranya dapat menunjukkan akibat ekonomi yang parah, seperti konsep *shared poverty* (Geertz, 1963); sehingga sulit dan tidak adil bila menimpakan kesalahan pokok hanya pada sistem pasar semata. Sebenarnya cukup banyak faktor lain yang perlu dikaji untuk “menjelaskan” kemiskinan penduduk perdesaan, namun tidak bisa dianggap sebagai “simbol kemiskinan” dari suatu daerah, yang dianggap relevan dengan berbagai masalah yang telah, sedang dan akan dihadapi perekonomian Indonesia. Pada dasarnya tingkat kemiskinan suatu masyarakat berhubungan erat dengan kesenjangan distribusi pendapatannya (Prasetyawan, 1998), dan diperlukan aspek-aspek perbaikan distribusinya. Kesenjangan distribusi pendapatan berkorelasi positif dengan besarnya proporsi rumahtangga miskin di suatu komunitas.

a. Faktor Internal

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), mayoritas pekerjaan utama responden adalah petani (88,5%), dan sisanya bekerja sebagai buruh tani, pedagang, jasa, dan PNS, masing-masing sekitar 0,9%. Sedangkan pekerjaan sampingan mayoritas masih menjadi petani (85,2%), buruh tani (4,9%), buruh industri (2,4%), bangunan (tukang 3,7% dan kenek (1,2%), jasa (1,2%), dan PNS (1,2%) (Nurmanaf, *et al*, 2002). Bagi petani yang mampu, sebagian besar mengusahakan pemeliharaan ternak. Sedang bagi petani yang tidak mampu memelihara ternak, selain sebagai penggarap mereka menjadi buruh tani untuk menambah pendapatan rumahtangga.

Rata-rata responden memiliki lahan sendiri (80%) dan menumpang pada orangtua atau kerabat (9,2%) dengan rata-rata luas sekitar 0,5 ha, dan belum ditemukan adanya sistem sewa, karena keyakinan adat yang kuat bahwa tanah harus dimiliki secara turun temurun. Kondisi rumah relatif baik meski atap dan dinding rumah mereka umumnya (36,1%) hanya menggunakan bahan tradisional (pelepah daun lontar dan pelepah daun kirai), serta berlantaikan tanah (sekitar 40%). Manfaat MCK untuk mengatasi masalah sanitasi baru dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sejak adanya bantuan dari pihak LSM. Berjalan kaki merupakan alat transportasi yang selalu mereka lakukan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, karena langka dan mahalnya ongkos kendaraan umum.

Peningkatan produktivitas usahatani di NTT lebih sulit dibanding kawasan lain karena kemarjinalan lahan kering yang diusahakan petani. Kondisi tersebut juga dipicu oleh masih terbatasnya inovasi teknologi lahan kering, serta terbatasnya kemampuan SDM petaninya untuk mengadopsi dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan pendekatan perbaikan dan pengembangan teknologi yang sudah ada terutama dalam penggunaan bibit unggul, efisiensi, efektivitas tenaga kerja, dan saprodi, sebelum introduksi teknologi baru.

Teknologi yang sudah diusahakan dan sedang diupayakan pengembangannya sejak tahun 1996 adalah usaha penggemukan sapi (ternak sapi potong) di Desa Oenoni (Kecamatan Amarasi) dan desa Baumata (Kecamatan Kupang Tengah) yang dapat menunjang kehidupan ekonomi petani, namun menemui banyak kendala dan masalah pada peternak (antara plasma dan inti), dan akhirnya bersifat individualistik. Terdapat 3 faktor utama dalam paket teknologi ternak sapi potong yang sudah berjalan, yaitu: 1) sistem pemeliharaan induk sapi secara semi intensif; 2) perbaikan keberhasilan program IB melalui kondisi induk sapi; 3) sistem pengembangan HMT di lahan petani, yang didukung oleh tanaman jagung sebagai tanaman pangan pokok yang limbahnya dapat dipergunakan sebagai pakan sapi.

Dengan rata-rata luas pemilikan lahan sekitar 0,5 ha, dimana pada MH diusahakan padi sekitar 0,34 ha, dan 0,27 ha pada MK, namun hasil panen lebih tinggi diperoleh pada MK (1,51 ton/ha). Dari seluruh tanaman palawija, yang diusahakan terutama pada MH, jagung dan ubikayu menempati rata-rata luas dari lahan yang diusahakan, dengan produksi jagung sekitar 0,62 ton/ha dengan nilai sekitar Rp.1 juta/panen. Pendapatan usahatani yang lain diperoleh dari tanaman hortikultura (labu, sawi dan bawang merah) serta dari kelapa, pisang dan kemiri. Sedang pendapatan *non-farm*, umumnya diperoleh dari dagang, buruh, tukang kayu, tukang batu, dan industri. Beragamnya usaha untuk memperoleh pendapatan rumah tangga di NTT tersebut, namun yang paling banyak tetap dari sektor pertanian, yaitu sebagai buruh tani, mengindikasikan keterbatasan ragam lapangan pekerjaan yang tersedia di NTT.

b. Faktor Eksternal

Kawasan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah beragro-ekosistem lahan kering (60-70% dari total luas wilayah), minim air, sehingga menyulitkan petani mengusahakan pertaniannya. Curah hujan yang relatif rendah (kurang dari 1500 mm/tahun, dengan musim kemarau yang panjang (6-8 bulan/tahun) memposisikan ketidakpastian dan resiko panen yang cukup tinggi dan mencerminkan sifat subsisten. Petani harus bisa memanfaatkan keterbatasan air tersebut dengan strategi pengelolaan usahatani dan jenis komoditas (umur pendek dan tahan kering) sebijak mungkin demi mengurangi resiko kegagalan panen.

Aspek iklim lain yang mencerminkan keterbatasan (kemarjinalan) lahan kering seperti: relatif tingginya temperatur, angin, radiasi sinar matahari, dan kelembaban, sangat mempengaruhi tingkat produktivitas komoditas pertanian di lahan kering. Di samping itu, kurangnya humus tanah, topografi bergelombang/berbukit, riskan terhadap erosi, sering menyebabkan hilangnya lapisan atas tanah (yang relatif subur) ketika musim hujan. Selain itu, masih banyak ditemukan perladangan berpindah sehingga mengurangi kesuburan lahan pertanian dan banyaknya lahan terlantar.

Infrastruktur kelembagaan sebagai pendukung fasilitas sarana dan prasarana sebagai publik juga masih terbatas, terindikasi dari mahal biaya pendidikan, mahal akses transportasi (sarana jalan dan alat angkutan), minimnya kondisi tempat beribadat (mesjid dan gereja). Di bidang pertanian, keterbatasan

tersebut ditemukan pada: tidak berfungsinya kelompok tani (meski PPL tersedia, namun petani tidak merasakan manfaatnya), terbatasnya lembaga permodalan, dan sebagainya. Meski demikian, Pemda setempat mengakui sedang dilaksanakannya pembangunan, namun belum diprioritaskan ke sektor pertanian. Prioritas masih ditujukan ke sektor yang berkontribusi lebih besar ke PAD, seperti: pembangunan gedung instansi pemerintah, pembuatan dam sepanjang sungai, perbaikan dan pembuatan jalan antar kecamatan, serta peremajaan pasar kabupaten.

Kelembagaan yang menonjol di NTT adalah lembaga kekerabatan, bukan lembaga yang bersifat materi. Semua kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas kehidupan masyarakat (mengatur kepemilikan lahan, aktivitas usahatani dan sebagainya), termasuk ekonomi/materi (uang/modal usaha) akan berkaitan langsung dengan lembaga kekerabatan tersebut. Kelembagaan kekerabatan juga mempengaruhi aktivitas pembangunan pengembangan wilayah, dimana untuk membangun sarana dan prasarana publik dilakukan berdasarkan azas kekerabatan (gotong royong).

Dengan demikian, untuk mengembangkan pembangunan di NTT, keberpihakan terhadap lembaga kekerabatan (tradisional) sangat diperlukan. Pemberian rangsangan positif bagi perbaikan dan pengembangan kelembagaan sosial ekonomi perlu mendapat prioritas dalam setiap rancangan program kebijakan pembangunan di NTT. Mengingat kompleksnya permasalahan kemiskinan, diperlukan penanggulangan *multicara* dan *multidisiplin*, diantaranya pemberdayaan (*empowerment*) petani di lahan marjinal. Pemberdayaan petani miskin agar berpartisipasi aktif dalam setiap program pembangunan, merupakan salah satu upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga di lahan marjinal dengan tujuan mencapai ketahanan dan keamanan pangan di perdesaan.

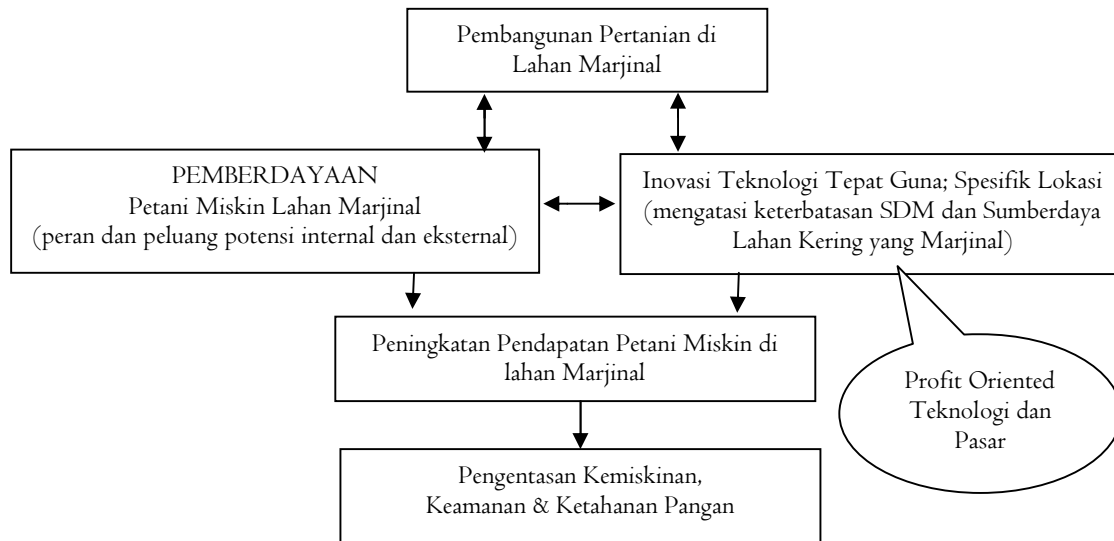
PEMBERDAYAAN: MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN DI PERDESAAN DAN KEBERPIHAKAN PADA PETANI MISKIN

Makna pemberdayaan mencakup tiga aspek, yang meliputi: 1) penciptaan kondisi kondusif yang mampu mengembangkan potensi masyarakat setempat; 2) memperkuat modal (potensi) sosial masyarakat demi meningkat mutu kehidupannya; 3) mencegah dan melindungi agar kekuatan atau tingkat kehidupan masyarakat yang sudah lemah menjadi semakin lemah (Sumodiningrat, 1997). Pemberdayaan (*empowerment*) adalah rangkaian upaya strategi memperluas dan meningkatkan akses dan peluang masyarakat terhadap sumberdaya pembangunan melalui agar masyarakat lapisan bawah (baca: masyarakat perdesaan dan masyarakat miskin) mampu berpartisipasi. Pemberdayaan juga merupakan upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengakses proses pembangunan dan mendorong kemandirian yang berkelanjutan (tanggap dan kritis terhadap perubahan) serta mampu berperan aktif menentukan nasibnya sendiri (Elizabeth, 2007b).

Pemberdayaan (*empowerment*) mampu memperbaiki makna *powerless* masyarakat kecil (yang umumnya timpang dan kurang memihak kepentingan petani), dan mengarah pada pengadvokasian *power structure* petani. Pemberdayaan lebih terkait dengan penguatan terhadap ketidakberdayaan (kemiskinan) masyarakat, yang diberdayakan dengan memanfaatkan pengetahuan dan kearifan lokal (*indigenous knowledge*), agar menjadi subyek dalam pembangunan, mampu menolong dirinya sendiri, mandiri, serta mengembangkan semangat *self-reliance* setempat.

Faktor pendukung pemberdayaan petani pada dasarnya meliputi: 1) memiliki kemampuan beradaptasi terhadap: agro-ekosistem setempat, mekanisme pembangunan yang diterapkan, maupun dinamikanya dalam mensiasati kemungkinan eksploitasi oleh petani lapisan atas; 2) partisipasi para petani yang tinggi; 3) kekuatan solidaritas petani sebagai konsekuensi lahir dan terbentuk dari masyarakat di suatu perdesaan; 4) persepsi yang baik dari petani maupun buruh tani terhadap kedudukan dan peran usahatani; 5) struktur dan aturan main merupakan produk konstruksi petani itu sendiri sehingga ditaati, dihargai, dan dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat petani maupun komunitasnya; dan 6) bersifat informal dengan struktur sederhana dan arah yang adil dan bukan persaingan.

Pemberdayaan merupakan upaya menciptakan suasana/iklim kondusif yang memungkinkan suatu potensi dapat berkembang dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*arousal*) akan potensi yang dimiliki. Diperlukan berbagai aspek mendasar seperti: 1) meningkatkan ketrampilan petani agar dapat memperluas kegiatan usaha tidak hanya produksi, namun di bidang agribisnis secara keseluruhan, dimana peran fasilitator perlu ditingkatkan efektivitasnya, terutama dalam mendinamisasi kelembagaan tradisional; 2) mengurangi/menghilangkan intervensi atas desa terhadap struktur dan norma sosial petani dan usahatani; 3) peningkatan akses informasi teknologi dan transfer pengetahuan antar petani, baik melalui percontohan maupun kerjasama antar kelembagaan petani yang ada, seperti yang digambarkan berikut:



Perlunya upaya memperkuat potensi atau daya yang dimiliki dengan membuka atau menciptakan aksesibilitas terhadap berbagai peluang yang menjadikannya semakin berdaya. Penciptaan iklim kondusif meliputi: 1) selektifitas adopsi paket teknologi agar tidak memudarkan peran petani dan menghilangkan pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*); 2) perbaikan sistem dan mekanisme pemasaran khususnya peningkatan harga jual di tingkat petani; 3) perubahan persepsi sosial terhadap etos nilai kerja pertanian rendah dan tidak mampu mengangkat status sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Diperlukan beberapa upaya konkrit dalam penciptaan iklim kondusif yang menunjang pemberdayaan petani seperti: 3) pemberian pelatihan/peningkatan kemampuan SDM petani agar mengarah pada unit ekonomi produktif; 2) melakukan pengkaderan generasi muda pertanian di perdesaan; 3) melibatkan kembali peran tokoh informal dalam kegiatan penggalangan sosial ekonomi SDM petani; dan 4) melibatkan tokoh agama dalam membangun etos kerja dan strategi hidup produktif dan hemat. Secara evolutif, pengeluaran rumah tangga petani diefisienkan dan diarahkan ke aktivitas yang hemat waktu dan biaya. Sifat kedinamisan pemberdayaan sebagai faktor utama penyesuaian langkah keseimbangan pada segala perubahan yang terjadi.

Kebijakan pemberdayaan petani meliputi: 1) *Kebijakan langsung*, melalui penyediaan bahan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan. Kemampuan menghasilkan nilai tambah, perbaikan akses sumberdaya, teknologi, pasar, dan sumber pembiayaan; 2) *Kebijakan tidak langsung*, penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan upaya peningkatan pemerataan, pemberdayaan, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan; 3) *Kebijaksanaan khusus*, penyiapan melakukan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat.

Pelaksanaan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi di lahan kering yang marjinal selama ini kurang diprioritaskan bahkan relatif tertinggal dibanding lahan beragrosistem lainnya, terutama lahan irigasi. Rancangan pengembangan informasi dan diseminasi teknologi pertanian, serta dukungan fasilitas umum seringkali mengabaikan (bukan untuk) petani di lahan marjinal yang miskin secara ekonomi. Kenyataan ini memposisikan keterkungkungan semakin terperosok merkanya dalam perangkat kemiskinan. Suatu alternatif perbaikan insentif melalui pengembangan dan pemberdayaan kemampuan petani miskin, pengembangan daya dukung kelembagaan terkait pemasaran yang berpihak pada petani disertai akselerasi inovasi penggunaan teknologi pertanian di lahan kering, merupakan peluang emas untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Pemberdayaan petani miskin di NTT terlihat dari peningkatan aksesibilitas mereka terhadap pelaksanaan program pembangunan penanggulangan kemiskinan, seperti mendapat bantuan TASKIN sebagai program JPS (Jaring Pengamanan Sosial) melalui pembagian beras miskin, program CCF (*Christian Children Fund*, pemberian bantuan uang saku pada anak sekolah), bantuan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus), dan bantuan bibit tanaman kacang-kacangan, program plesterisasi dari BKKBN (bantuan rumah sehat dan permanen), bantuan sapi dari Bupati, program pengaturan irigasi, serta bantuan pembangunan sekolah dasar. Di sektor peternakan diterapkan perbaikan dan pengembangan usahatani berbasis sapi potong (P2RT) sehingga dapat terintegrasi antar petani yang sama. Lebih ditingkatkannya penanaman rumput, tanaman lamtoro, legum (*alley cropping*) dan sebagai tanaman pelindung (sistem amarasi) untuk mencegah tanah longsor, meningkatkan kesuburan dan kelembaban tanah, kayu bakar, dan sebagai pakan ternak sapi, serta dapat mengurangi (efisiensi) tenaga kerja menyang.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kegiatan usahatani merupakan mata pencaharian utama sebagian besar rumah tangga responden dan kontribusi usahatani padi masih mendominasi pendapatan keluarga.

Usaha ternak dan non farm (dagang, industri rumah tangga, dan pertukangan) potensial untuk ditingkatkan, dan sistem keamanan terpadu oleh masyarakat sendiri dalam usaha ternak perlu ditingkatkan.

Perbaikan dan pengembangan teknologi indigenous yang selama ini diterapkan petani perlu dipertimbangkan sebelum introduksi teknologi baru disosialisasikan.

Meningkatnya aksesibilitas petani miskin terhadap pelaksanaan program pembangunan penanggulangan kemiskinan melalui penerimaan berbagai program bantuan.

Program pembangunan di NTT masih diprioritaskan ke sektor yang berkontribusi lebih besar ke PAD, seperti: pembangunan gedung instansi pemerintah, pembuatan dam sepanjang sungai, perbaikan dan pembuatan jalan antar kecamatan, serta peremajaan pasar kabupaten.

Kelembagaan yang menonjol di NTT adalah lembaga kekerabatan, bukan lembaga bersifat materi, sehingga mempengaruhi semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, ekonomi/modal usaha, serta aktivitas pembangunan pengembangan wilayah. Untuk mengembangkan pembangunan di NTT, keberpihakan terhadap lembaga kekerabatan (tradisional) sangat diperlukan.

Model dan bentuk (format) bantuan seharusnya disesuaikan dengan wilayah (spesifik lokasi) dan kemampuan (SDM) petani yang menjadi target serta harus menjadi program utama pemerintah bila ingin membangun pertanian terutama di wilayah marjinal.

Diperlukan strategi pemberdayaan dan partisipatif petani miskin, sebagai keberpihakan terhadap petani miskin. Diperlukan tindakan perlindungan sehingga pemberdayaan juga dapat berfungsi sebagai upaya memamdirikan petani miskin dan mencegah ketergantungan pada program bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2004. Kebijakan Pasar Kerja untuk Memperluas Kesempatan Kerja. Lembaga Penelitian SEMERU.
- Anonim. 2004. Kebijakan Pasar Kerja Untuk Memperluas Kesempatan Kerja Lembaga Penelitian SEMERU.
- BPS, berbagai tahun terbitan. Indikator Tingkat Hidup Pekerja. BPS. Jakarta.
- Creswell, J.W. 1994. Research Design: Qualitative and Quatitative Approaches. SAGE Publication.
- Elizabeth, R. 2005. Restrukturisasi Ketenagakerjaan dalam Proses Modernisasi Berdampak Perubahan Sosial pada Masyarakat Petani. Jurnal SOCA. Bali.
- Erwidodo. .1992. Evaluasi Perkembangan Tingkat Upah Sektor Pertanian. PSE. Bogor.
- Hadiz, V. R. and Daniel D. (eds). 2005. Social Science and Power in Indonesia. Equinox. Publishing. Jakarta Singapore. ISEAS.
- Manning, Chris. 2000. Labour Market Adjustment to Indonesia's Economic Crisis:Context, Trend, and Implications. Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES). Vol.36. No. 1. April 2000: p.105-136. ANU Canberra.
- Rachman, B. 1993. Deskripsi Tingkat Upah Buruh Tidak Terdidik di Pedesaan, Indonesia. PSE. Bogor. FAE Vol.II. No.2. Des. 1993.
- Rusastra, I. W. R. Elizabeth, Supriyati, K. Noekman, E. Suryani. 2005. Analisis Ekonomi Ketenagakerjaan Sektor Pertanian dan Pedesaan di Indonesia. PSE. Bogor.
- Singh, K. P. 2002. Integrated Farming System for Smallholders in India Models and Issues for Semi-arid Tropical Conditions. (<http://www.cipav.org.co/lrrda10/3/sam103p.htm>; download Sept.16.2005)
- Yin, R.K. 1997. Studi Kasus: Desain dan Metode. Grasindo. Jakarta.
- Yusdja, Y. et al. 2003. Kebijakan Sistem Usaha Pertanian dan Program Kemiskinan dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan Petani. PSE. Bogor.